



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, Indikator Kinerja Utama pada instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/84/M.AA.05/2019, yang menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memastikan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan, khususnya Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) hingga level individu dengan menyusun penjenjangan kinerja;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/738/AA.05/2022, yang menyatakan bahwa perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) level instansi dan unit kerja yang dilengkapi definisi operasional dan formulasi perhitungan serta menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

- dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 739) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 614);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU, di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, IKU pada instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dengan memperhatikan:

- a. tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika yang ditujukan untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik;
- b. IKU pada tingkat Kementerian/Lembaga paling sedikit meliputi indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
- c. IKU pada unit organisasi setingkat Eselon I meliputi indikator hasil (*outcome*) dan/atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit organisasi di bawahnya.

KETIGA : Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan hal, sebagai berikut:

- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan, bidang kewenangan, tugas, dan fungsi, serta peran lainnya;
- b. kesesuaian dengan pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan sinergi antar unit eselon I dalam mencapai *output* dan *outcome* program;
- c. memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi, dan diukur.

KEEMPAT : IKU di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menyusun dan menetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
- b. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
- c. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024, Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2024, dan Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024).

KELIMA : IKU di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh pimpinan Unit Kerja, yang terdiri atas:

- a. Menteri Komunikasi dan Informatika;
- b. Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- c. Direktur Utama BLU BAKTI; dan
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

KEENAM ÷ Pimpinan Unit Kerja Eselon I, Direktur Utama BLU BAKTI dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas:

- a. menetapkan IKU dari unit organisasi yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangannya mengacu pada IKU Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau IKU Unit Kerja Eselon I;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan kinerja yang dikoordinasikan dan disusun oleh Satuan Kerja yang mempunyai fungsi Kesekretariatan di lingkup Unit Kerja Eselon I dan BLU BAKTI; dan
- c. memperhatikan mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

- KETUJUHH : Mekanisme pengukuran dan pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM meliputi:
- a. pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan dan berjenjang dengan meneliti fakta yang ada, baik berupa kendala, hambatan, maupun informasi lainnya;
 - b. data valid yang digunakan dalam pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan data yang telah diinput ke dalam sistem aplikasi pengelolaan kinerja (pantau.kominfo.go.id) yang telah diverifikasi dan dievaluasi oleh Satuan Kerja yang mempunyai fungsi Kesekretariatan di lingkup Unit Kerja Eselon I dan BLU BAKTI; dan
 - c. rekapitulasi hasil pengukuran dan pengumpulan data kinerja dilaporkan melalui nota dinas oleh Satuan Kerja yang menjadi penanggung jawab indikator kinerja kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I dan/atau BLU BAKTI terkait lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikoordinasikan serta diverifikasi oleh Satuan Kerja yang mempunyai fungsi Kesekretariatan di lingkup Unit Kerja Eselon I dan BLU BAKTI;
- KEDELAPAN : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan oleh setiap pimpinan Unit Kerja Eselon I dan BLU BAKTI serta disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan diunggah pada aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id) paling lambat di minggu keempat bulan Februari tahun (n+1).
- KESEMBILAN : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas:

- a. melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja paling lambat di minggu ketiga bulan Februari tahun (n+1); dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala minimal satu tahun sekali.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN
 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SS.1 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	IKU.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika yang Terjangkau Layanan <i>Mobile Broadband</i> 4G (Kumulatif)	Jumlah lokasi layanan BTS USO dan 4G yang beroperasi di wilayah 3T: 1. OM BTS 4G/ <i>Lastmile</i> Non Papua sebanyak 2.884 lokasi 2. OM BTS 4G/ <i>Lastmile</i> Papua sebanyak 2.141 lokasi	Jumlah lokasi BTS USO dan BTS 4G di wilayah 3T yang telah beroperasi	5.025 Desa/Kelurahan	BLU BAKTI

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.1.2 Persentase (%) Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) di <i>Terrestrial</i> melalui <i>Ground Segment</i> /IP Hub (Kumulatif)	Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) yang terhubung melalui stasiun bumi dan perangkat IP HUB	Jumlah Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) yang telah berkontrak	6,67% (10 Gbps dari kapasitas total 150 Gbps)	BLU BAKTI
SS.2 Meningkatnya Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio serta Pengembangan Ekosistem Industri TIK	IKU.2.1 Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi Radio untuk Layanan <i>Broadband</i>	Penyediaan rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i> .	Tersedianya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i>	100%	Ditjen SDPPI
SS.3 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	IKU.3.1 Persentase (%) Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV Digital (Kumulatif)	Persentase (%) dimaksud adalah persentase populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi digital. Jangkauan populasi dihitung berdasarkan daya pancar efektif (ERP) lokasi transmisi digital (<i>desktop study</i>).	<i>Desktop study</i> : Simulasi aplikasi (Chirplus_BC) dan pengolahan data simulasi secara matematis (<i>Dashboard TVD</i>). <i>Field study</i> : Pengukuran <i>field strength</i> dengan metode sampling. Persentase = (populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi digital / jumlah penduduk Indonesia) x 100%	80% (208.913.908 penduduk dari total 261.142.385 penduduk Indonesia)	Ditjen PPI

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SS.4 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	IKU.4.1 Nilai Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2024	Merupakan kegiatan untuk melihat dan memetakan tingkat literasi digital masyarakat di Indonesia dalam skala nasional yang akan menjadi evaluasi program Literasi Digital dan juga sebagai masukan dalam kebijakan dan kegiatan literasi digital secara umum serta terdapat survei untuk mengukur Kinerja Program Literasi Digital	Pengukuran Indeks Literasi Digital dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 10.000 responden dengan rentang usia 13-70 tahun dan mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penentuan sampel survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan <i>Margin of Error</i> (MoE) +/-0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode dan pendekatan ini diterapkan secara konsisten sejak awal pelaksanaan Survei Status Literasi Digital di Indonesia.	3,7	Ditjen APTIKA
	IKU.4.2 Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten	Peserta yang mengikuti pelatihan Digital Skill yang mendapatkan sertifikat. Untuk tahun 2024 ditargetkan peserta pelatihan sebanyak 49.900 orang.	$\frac{\sum \text{peserta pelatihan digital skill yang mendapatkan sertifikat}}{\sum \text{peserta pelatihan digital skill atau \sum peserta pelatihan yang berhak mengikuti sertifikasi kompetensi (khusus VSQA)}} \times 100\%$ Keterangan Metode Pengukuran: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fresh Graduate Academy (FGA) Peserta FGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan. 2. Vocational School Graduate Academy (VSGA) Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi. 3. Government Transformation Academy (GTA) Peserta GTA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi 	83,75% (41.791 Peserta Tersertifikasi dari Total Target 49.900 Peserta)	BPSDM

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			<p>ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 10% dari total jam pelatihan dan memenuhi nilai akhir minimal 65 terdiri atas <i>pre test</i>, penugasan, dan <i>post test</i>.</p> <p>4. Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Peserta DEA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti pelatihan, mencapai nilai <i>post test</i> minimal 60 dan khusus untuk kurikulum yang mendapatkan tugas pendampingan harus mengumpulkan salah satu tugas pendampingan.</p> <p>5. Thematic Academy (TA) Peserta TA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 yang terdiri atas: penilaian absensi, <i>post test/final exam</i> dan atau kuis/tugas.</p> <p>6. Professional Academy (Pro A) Peserta ProA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi kriteria kelulusan oleh mitra pelatihan ProA.</p> <p>7. Talent Scouting Academy (TSA) Peserta TSA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan.</p>		

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																																
SS.5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IKU.5.1 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Merupakan survei persepsi kepada masyarakat terkait dengan aksesibilitas informasi kebijakan prioritas pemerintah yang telah disebar.	Dihitung dari responden usia 17-55 tahun (pria/wanita) di kota-kota besar yang mewakili Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur.	81%	Ditjen IKP																																																
SS.6 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo Tahun 2024	Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi pemerintah yang dievaluasi oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kategori serta predikat dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai/ Angka</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>>100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td></td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>A-</td> <td>>80 - 100</td> <td>Memuaskan dengan catatan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>BB</td> <td>>70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>B</td> <td>>60 - 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CC</td> <td>>50 - 60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>C</td> <td>>30 - 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>D</td> <td>0 - 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	1	AA	>100	Sangat Memuaskan	2	A		Memuaskan	3	A-	>80 - 100	Memuaskan dengan catatan	4	BB	>70 - 80	Sangat Baik	5	B	>60 - 70	Baik	6	CC	>50 - 60	Cukup	7	C	>30 - 50	Kurang	8	D	0 - 30	Sangat Kurang	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Bobot dan Indikator dapat diatur setiap tahunnya dan bersifat dinamis. Ketentuan mengenai detail dari setiap komponen, teknik pengukuran, bobot dari setiap komponen/sub komponen, serta koefisien penilaian akan ditentukan oleh Evaluator Nasional melalui keputusan menteri. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen Penilaian</th> <th>Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>RB General</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RB Tematik</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indeks RB</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian	Bobot	1	RB General	100	2	RB Tematik	10	3	Indeks RB	110	81	<ul style="list-style-type: none"> • Setjen • Itjen • Ditjen SDPPI • Ditjen PPI • Ditjen APTIKA • Ditjen IKP • BPSDM • BLU BAKTI
No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat																																																		
1	AA	>100	Sangat Memuaskan																																																		
2	A		Memuaskan																																																		
3	A-	>80 - 100	Memuaskan dengan catatan																																																		
4	BB	>70 - 80	Sangat Baik																																																		
5	B	>60 - 70	Baik																																																		
6	CC	>50 - 60	Cukup																																																		
7	C	>30 - 50	Kurang																																																		
8	D	0 - 30	Sangat Kurang																																																		
No	Komponen Penilaian	Bobot																																																			
1	RB General	100																																																			
2	RB Tematik	10																																																			
3	Indeks RB	110																																																			

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA												
	IKU.6.2 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023	Indikator ini merupakan target opini BPK atas Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2023	Target dihitung menggunakan indeks skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1226 431 1734 732"> <thead> <tr> <th>Jenis Opini</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>WDP dengan 1-2 Pengecualian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>WDP dengan ≥ 3 Pengecualian</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Menyatakan Pendapat</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Opini	Indeks	WTP	4	WDP dengan 1-2 Pengecualian	3	WDP dengan ≥ 3 Pengecualian	2	Tidak Wajar	1	Tidak Menyatakan Pendapat	0	4 (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Setjen • Itjen • Ditjen SDPPI • Ditjen PPI • Ditjen APTIKA • Ditjen IKP • BPSDM • BLU BAKTI
Jenis Opini	Indeks																
WTP	4																
WDP dengan 1-2 Pengecualian	3																
WDP dengan ≥ 3 Pengecualian	2																
Tidak Wajar	1																
Tidak Menyatakan Pendapat	0																
SS.7 Tercapainya Target PNBPN Kementerian Kominfo	IKU.7.1 Persentase (%) Realisasi Target PNBPN Kementerian Kominfo Tahun 2024	Pencapaian target PNBPN bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika, pos, penyiaran dan telekomunikasi, aplikasi informatika, pengembangan sumber daya manusia dan BLU BAKTI tahun 2024.	$\frac{\text{Realisasi PNBPN Kementerian Kominfo Tahun 2024}}{\text{Target PNBPN Kementerian Kominfo Tahun 2024}} \times 100\%$	100% (Rp25.582.000.000.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen SDPPI • Ditjen PPI • Ditjen APTIKA • BPSDM • BLU BAKTI 												

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2024 Berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB General Sekretariat Jenderal	Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Kemkominfo dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB	Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/ <i>on-going</i>	96,31 (Penilaian Itjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Perencanaan • Biro Kepegawaian dan Organisasi • Biro Keuangan • Biro Hukum • Biro Humas • Biro Umum • PDSI
	IKU.1.2 Nilai Akuntabilitas (AKIP) Kementerian Kominfo Tahun 2024	<p>Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kominfo yang dilakukan oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap</p>	<p>Berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN & RB atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kemenkominfo* dengan metode penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan bobot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja = 30% 2. Pengukuran Kinerja = 30% 3. Pelaporan Kinerja = 15% 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal = 25% <p>*Catatan: Capaian berdasarkan penilaian dari APIP apabila hasil penilaian dari</p>	68,5	Biro Perencanaan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
		penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>).	Kementerian PAN & RB belum dirilis pada tahun (n)		
	IKU.1.3 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kominfo Tahun 2024	Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Evaluasi BPKP dengan menghitung bobot penetapan tujuan, struktur proses, dan pencapaian tujuan. Bobot Penilaian Komponen: <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Tujuan : 40% • Struktur dan Proses : 30 % • Pencapaian Tujuan : 30 % 	3	Biro Perencanaan
	IKU.1.4 Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran Kementerian Kominfo yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	91	Biro Keuangan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA												
	IKU.1.5 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023	Indikator ini merupakan target Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2023	Target dihitung menggunakan indeks skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1315 472 1754 841"> <thead> <tr> <th>Jenis Opini</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>WDP dengan 1-2 Pengecualian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>WDP dengan ≥ 3 Pengecualian</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Menyatakan Pendapat</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Opini	Indeks	WTP	4	WDP dengan 1-2 Pengecualian	3	WDP dengan ≥ 3 Pengecualian	2	Tidak Wajar	1	Tidak Menyatakan Pendapat	0	4 (WTP)	Biro Keuangan
Jenis Opini	Indeks																
WTP	4																
WDP dengan 1-2 Pengecualian	3																
WDP dengan ≥ 3 Pengecualian	2																
Tidak Wajar	1																
Tidak Menyatakan Pendapat	0																
	IKU.1.6 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 a. Kementerian Kominfo b. Sekretariat Jenderal	Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kominfo dan Sekretariat Jenderal tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	a. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa) b. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Umum • Sekretariat Dewan Pers • Sekretariat KIP • Sekretariat KPI 												

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	<p>IKU.1.7</p> <p>Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024</p> <p>a. Kementerian Kominfo</p> <p>b. Sekretariat Jenderal</p>	<p>Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kominfo dan Sekretariat Jenderal yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.</p>	<p>Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.</p>	<p>a. 30% (dari total Rencana Pengadaan melalui Penyedia)</p> <p>b. 30% (dari total Rencana Pengadaan melalui Penyedia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Umum • Sekretariat Dewan Pers • Sekretariat KIP • Sekretariat KPI

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA												
SP.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.1.1 Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2023	Indikator ini merupakan target Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2023	Target dihitung menggunakan indeks skala 1-4 dengan rincian sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="1355 548 1791 922"> <thead> <tr> <th>Jenis Opini</th> <th>Indeks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WTP</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>WDP dengan 1-2 Pengecualian</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>WDP dengan ≥ 3 Pengecualian</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Tidak Wajar</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tidak Menyatakan Pendapat</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Opini	Indeks	WTP	4	WDP dengan 1-2 Pengecualian	3	WDP dengan ≥ 3 Pengecualian	2	Tidak Wajar	1	Tidak Menyatakan Pendapat	0	4 (WTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Inspektorat Jenderal • Inspektorat I • Inspektorat II • Inspektorat III • Inspektorat IV
	Jenis Opini	Indeks															
WTP	4																
WDP dengan 1-2 Pengecualian	3																
WDP dengan ≥ 3 Pengecualian	2																
Tidak Wajar	1																
Tidak Menyatakan Pendapat	0																
IKU.1.2 Nilai Penguatan Pengawasan Kementerian Kominfo Tahun 2024	Implementasi reformasi birokrasi khususnya pada aspek penguatan pengawasan yang terdiri dari pengukuran capaian pada indikator Penanganan Gratifikasi, Penerapan SPIP, Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas), <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> , Penanganan Benturan Kepentingan, Pembangunan Zona Integritas, dan Kapabilitas APIP.	Penilaian pada LKE Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan serta penilaian spesifik pada 7 aspek penguatan pengawasan	5 (Penilaian Itjen)	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Inspektorat Jenderal • Inspektorat I • Inspektorat II • Inspektorat III • Inspektorat IV 													

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.1.3 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Inspektorat Jenderal	Memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB yang berisikan solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Kemkominfo dan memiliki kualitas yang baik, serta layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB	Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/ <i>on-going</i>	82 (Penilaian Itjen)	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	IKU.1.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran Inspektorat Jenderal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	92	Sekretariat Inspektorat Jenderal
	IKU.1.5 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal Tahun 2024	Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	Min. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)	Sekretariat Inspektorat Jenderal

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.1.6 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal yang Dilakukan Secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024	Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	Min. 30% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)	Sekretariat Inspektorat Jenderal

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN SDPPI TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.1 Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio	IKU.1.1 Persentase (%) Pemanfaatan Pita Frekuensi untuk Layanan <i>Broadband</i>	Penyediaan rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i>	Tersedianya rancangan kebijakan terkait pemanfaatan pita frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i>	100%	Dit. Penataan Sumber Daya
SP.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP	IKU.2.1 Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang Frekuensi dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2024	Pencapaian target PNBP bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika tahun 2024 (Rp20.747.921.532.000).	Target PNBP Ditjen SDPPI per capaian PNBP setiap bulan.	100% (Rp20.747.921.532.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Operasi Sumber Daya • Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika • Balai Besar Pengujian dan Perangkat Telekomunikasi

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2024	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya di Bidang SDPPI	Nilai indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika tahun 2024.	>3,6	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Operasi Sumber Daya • Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika • Balai Besar Pengujian dan Perangkat Telekomunikasi
	IKU.2.3 Indeks Integritas Pelayanan Publik Bidang Frekuensi dan Perangkat Pos dan Informatika Tahun 2024	Penilaian yang dilakukan terhadap pelayanan publik Ditjen SDPPI dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.	Nilai Indeks integritas pelayanan publik atas pelayanan di bidang SDPPI.	≥8,5	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Operasi Sumber Daya • Dit. Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika • Balai Besar Pengujian dan Perangkat Telekomunikasi

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen SDPPI Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen SDPPI	Penilaian Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen SDPPI Tahun 2024 dilaksanakan melalui Evaluasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo selaku Evaluator RB Internal Kementerian Kominfo	Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Jenderal atas Capaian Realisasi 3 (tiga) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Ditjen SDPPI TA 2024	100 (Penilaian Itjen)	Sekretariat Ditjen SDPPI
	IKU.3.2 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen SDPPI Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen SDPPI yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	92	Sekretariat Ditjen SDPPI
	IKU.3.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen SDPPI Tahun 2024	Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)	Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA-E1 diukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut: 1. Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit	90	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Ditjen SDPPI • Balai Besar Pengujian dan Perangkat Telekomunikasi • Unit Pelaksana Teknis (UPT)

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																						
			<p>Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)</p> <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1305 695 1754 1136"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I</th> <th colspan="3">Metode Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Bobot</th> <th>Bobot Pengurang</th> <th>Nilai Pengurang</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(4) x (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Tidak ada temuan</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Jumlah temuan 1</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Jumlah temuan 2 s.d. 3</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Jumlah temuan > 3</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian			Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)	1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50				1) Tidak ada temuan		0%	0		2) Jumlah temuan 1		-20%	-10		3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15		4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25		
No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian																																									
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)																																							
1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50																																									
	1) Tidak ada temuan		0%	0																																							
	2) Jumlah temuan 1		-20%	-10																																							
	3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15																																							
	4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25																																							

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																						
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I</th> <th colspan="3">Metode Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Bobot</th> <th>Bobot Pengurang</th> <th>Nilai Pengurang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)</td> <td>(2)</td> <td>(3)</td> <td>(4)</td> <td>(4) x (3)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Nilai 100</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Nilai 90 - 99</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Nilai 80 - 89</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Nilai dibawah 80</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian			Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)	2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50				1) Nilai 100		0%	0		2) Nilai 90 - 99		-20%	-10		3) Nilai 80 - 89		-30%	-15		4) Nilai dibawah 80		-50%	-25		
No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian																																									
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)																																							
2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50																																									
	1) Nilai 100		0%	0																																							
	2) Nilai 90 - 99		-20%	-10																																							
	3) Nilai 80 - 89		-30%	-15																																							
	4) Nilai dibawah 80		-50%	-25																																							
	IKU.3.4 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen SDPPI Tahun 2024	Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dalam belanja pengadaan Barang dan Jasa Ditjen SDPPI tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, baik yang dilaksanakan oleh Penyedia maupun secara Swakelola	70% (Komitmen PDN dari Penyedia dan Swakelola)	Sekretariat Ditjen SDPPI																																						
	IKU.3.5 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen SDPPI yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024	Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen SDPPI yang dilakukan dengan metode <i>E-Purchasing</i> Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode <i>E-Purchasing</i> melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia.	30% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)	Sekretariat Ditjen SDPPI																																						

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN PPI TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				2024	
SP.1 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	IKU.1.1 Persentase Populasi yang Terjangkau Penyiaran TV Digital (Kumulatif)	Persentase (%) dimaksud adalah persentase populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi digital. Jangkauan populasi dihitung berdasarkan daya pancar efektif (ERP) lokasi transmisi digital (<i>desktop study</i>)	<i>Desktop study</i> : Simulasi aplikasi (Chirplus_BC) dan pengolahan data simulasi secara matematis (Dashboard TVD). <i>Field study</i> : Pengukuran <i>field strength</i> dengan metode sampling Persentase = (populasi masyarakat yang mendapatkan layanan penyiaran televisi digital / jumlah penduduk Indonesia) x 100%	80% (208.913.908 Penduduk dari Total 261.142.385 Penduduk Indonesia)	Dit. Pengembangan Pitalebar
	IKU.1.2 Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Penyiaran Digital dan Aturan Pelaksanaannya	Jumlah dimaksud adalah jumlah rekomendasi kebijakan terkait televisi digital dan radio digital yaitu: 1. Kajian penerapan penyiaran melalui sinyal 5G. 2. Kajian potensi jenis jasa penyiaran melalui teknologi multiplatform 3. Kajian tekno ekonomi untuk pemerataan jasa penyiaran televisi 4. Evaluasi perhitungan tarif sewa saluran penyelenggaraan multipleksing di Indonesia	Jumlah didapatkan dari total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan	8 Rekomendasi Kebijakan	Dit. Penyiaran

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				2024	
		5. Evaluasi penerapan kerjasama penggunaan multipleksing 6. Kajian kesiapan ekosistem industri untuk penerapan simulcast jasa penyiaran radio 7. Kajian Uji Laik Operasi layanan radio simulcast 8. Telaah potensi PNBP atas layanan tambahan dan sistem penomoran televisi digital melalui terrestrial			
SP.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP	IKU.2.1 Persentase (%) Realisasi PNBP Bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Persentase (%) dimaksud adalah persentase realisasi PNBP bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi sebesar Rp1.229.046.744.000 yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Pos: Rp450.000.000 2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran: Rp50.044.726.000 3. BHP Telekomunikasi: Rp1.170.969.396.000 4. Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (KPLPU): Rp7.582.622.000 	Persentase = (Besaran PNBP hasil penagihan dan pemungutan Izin Penyelenggaraan Pos, Izin Penyelenggaraan Penyiaran, BHP Telekomunikasi, dan KPLPU / besaran target PNBP yang ditetapkan) x 100%	100% (Rp1.229.046.744.000)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Penyiaran • Dit. Pengendalian Pos dan Informatika

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				2024	
	IKU.2.2 Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	Indeks dimaksud adalah indeks hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Ditjen PPI Survei dan penilaian dilaksanakan sesuai dengan Permenpan No.14 Tahun 2017 tentang Indeks Persepsi Pelayanan Publik. *Dalam upaya terus meningkatkan kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung salah satu sasaran terwujudnya <i>Good Corporate Governance</i> maka diperlukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks = (Jumlah nilai IKM bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran / 3)	3,5 (Dari Skala 1 – 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Pos • Dit. Telekomunikasi • Dit. Penyiaran
	IKU.2.3 Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	Nilai indeks dimaksud adalah nilai Integritas Pelayanan Publik di bidang penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran. *Dalam upaya terus meningkatkan kepuasan pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung salah satu sasaran terwujudnya <i>Good Corporate Governance</i> , maka diperlukan pengukuran	Indeks = (Jumlah nilai IIPP bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran) / 3	8,5 (Dari Skala 1 – 10)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Pos • Dit. Telekomunikasi • Dit. Penyiaran

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
				2024	
		Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP).			
SP.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen PPI Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen PPI	Indeks dimaksud adalah ketercapaian progres pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Ditjen PPI sesuai isu prioritas nasional yang ditetapkan dalam 4 RB tematik dan general. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) oleh Inspektorat Jenderal.	Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/ <i>on-going</i>	88,86 (Penilaian Itjen)	Sekretariat Ditjen PPI
	IKU.3.2 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PPI Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen PPI yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	88	Sekretariat Ditjen PPI
	IKU.3.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen PPI Tahun 2024	Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)	Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA E1 diukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut: 1. Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit	90	Sekretariat Ditjen PPI

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																						
				2024																																							
			<p>Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)</p> <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I</th> <th colspan="3">Metode Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Bobot</th> <th>Bobot Pengurang</th> <th>Nilai Pengurang</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(4) x (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Tidak ada temuan</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Jumlah temuan 1</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Jumlah temuan 2 s.d. 3</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Jumlah temuan > 3</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian			Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)	1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50				1) Tidak ada temuan		0%	0		2) Jumlah temuan 1		-20%	-10		3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15		4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25		
No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian																																									
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)																																							
1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50																																									
	1) Tidak ada temuan		0%	0																																							
	2) Jumlah temuan 1		-20%	-10																																							
	3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15																																							
	4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25																																							

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																						
				2024																																							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I</th> <th colspan="3">Metode Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Bobot</th> <th>Bobot Pengu-rang</th> <th>Nilai Pengu-rang</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(4) x (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Nilai 100</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Nilai 90 - 99</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Nilai 80 - 89</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Nilai dibawah 80</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian			Bobot	Bobot Pengu-rang	Nilai Pengu-rang	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)	2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50				1) Nilai 100		0%	0		2) Nilai 90 - 99		-20%	-10		3) Nilai 80 - 89		-30%	-15		4) Nilai dibawah 80		-50%	-25		
No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian																																									
		Bobot	Bobot Pengu-rang	Nilai Pengu-rang																																							
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)																																							
2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50																																									
	1) Nilai 100		0%	0																																							
	2) Nilai 90 - 99		-20%	-10																																							
	3) Nilai 80 - 89		-30%	-15																																							
	4) Nilai dibawah 80		-50%	-25																																							
	IKU.3.4 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PPI tahun 2024	Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PPI tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	21,29% (dari total nilai anggaran belanja barang/jasa)	Sekretariat Ditjen PPI																																						
	IKU.3.5 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PPI yang Dilakukan Secara Elektronik (<i>E-purchasing</i>) Tahun 2024	Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen PPI yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	Min. 30% (dari total rencana pengadaan melalui penyedia)	Sekretariat Ditjen PPI																																						

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN APTIKA TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.1 Peningkatan Kompetensi Digital Tingkat Dasar Masyarakat Indonesia	IKU.1.1 Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2024	Merupakan kegiatan untuk melihat dan memetakan tingkat literasi digital masyarakat di Indonesia dalam skala nasional yang akan menjadi evaluasi program Literasi Digital dan juga sebagai masukan dalam kebijakan dan kegiatan literasi digital secara umum serta terdapat survei untuk mengukur Kinerja Program Literasi Digital	Pengukuran Indeks Literasi Digital dilakukan melalui survei tatap muka terhadap 10.000 responden dengan rentang usia 13-70 tahun dan mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penentuan sampel survei dilakukan dengan metode <i>multistage random sampling</i> dengan <i>Margin of Error (MoE)</i> +/-0,98% pada tingkat kepercayaan 95%. Metode dan pendekatan ini diterapkan secara konsisten sejak awal pelaksanaan Survei Status Literasi Digital di Indonesia.	3,7	Dit. Pemberdayaan Informatika
SP.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP	IKU.2.1 Persentase (%) Capaian Target PNBP Bidang APTIKA	Indikator ini mengukur realisasi capaian target PNBP bidang aplikasi informatika dari layanan publik berbayar.	$\frac{\text{Realisasi PNBP Ditjen Aptika tahun berjalan}}{\text{Target PNBP Ditjen Aptika tahun berjalan}} \times 100\%$	100% (Rp2.960.120.000)	Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika
	IKU.2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Bidang Aplikasi Informatika	Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada tahun berjalan	Nilai rata-rata dari Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap: <ul style="list-style-type: none"> Layanan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika: <ol style="list-style-type: none"> Layanan CekRekening.Id Layanan AduanNomor.Id Layanan AduanKonten.Id Verifikasipdf.rootca.id 	3,5 (Skala 1 – 4)	<ul style="list-style-type: none"> Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika Dit. Layanan Aplikasi

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat 2. Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik (Indonesia Game Rating System / IGRS) 3. Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) • Layanan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Data Nasional Sementara 2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 3. Jaringan Intra Pemerintah 4. Aplikasi PSE Publik 5. Aplikasi Domain 6. Aplikasi siCANTIK 		Informatika Pemerintah
	IKU.2.3 Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Aplikasi Informatika	Indikator ini mengukur tingkat Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Aplikasi Informatika pada tahun berjalan	Nilai rata-rata dari Indeks Minimum Integritas Pelayanan Publik Bidang Aplikasi Informatika	8,5 (Skala 1 – 10)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika • Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika • Dit. Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen APTIKA Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen APTIKA	Indikator ini mengukur nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen APTIKA pada tahun berjalan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal	Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan / <i>on-going</i>	83,25 (Penilaian Itjen)	Sekretariat Ditjen APTIKA
	IKU.3.2 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen APTIKA Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen APTIKA yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	88	Sekretariat Ditjen APTIKA
	IKU.3.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen APTIKA Tahun 2024	Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)	Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA E1 diukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut: 1. Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	90	Sekretariat Ditjen APTIKA

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																																															
			<p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1265 548 1774 1360"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I</th> <th colspan="3">Metode Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Bobot</th> <th>Bobot Pengurang</th> <th>Nilai Pengurang</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(4) x (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Tidak ada temuan</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Jumlah temuan 1</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Jumlah temuan 2 s.d. 3</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Jumlah temuan > 3</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Nilai 100</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Nilai 90 - 99</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Nilai 80 - 89</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Nilai dibawah 80</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian			Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)	1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50				1) Tidak ada temuan		0%	0		2) Jumlah temuan 1		-20%	-10		3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15		4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25	2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50				1) Nilai 100		0%	0		2) Nilai 90 - 99		-20%	-10		3) Nilai 80 - 89		-30%	-15		4) Nilai dibawah 80		-50%	-25		
No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian																																																																		
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)																																																																
1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50																																																																		
	1) Tidak ada temuan		0%	0																																																																
	2) Jumlah temuan 1		-20%	-10																																																																
	3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15																																																																
	4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25																																																																
2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50																																																																		
	1) Nilai 100		0%	0																																																																
	2) Nilai 90 - 99		-20%	-10																																																																
	3) Nilai 80 - 89		-30%	-15																																																																
	4) Nilai dibawah 80		-50%	-25																																																																

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.3.4 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen APTIKA Tahun 2024	Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam pengadaan Barang dan Jasa Ditjen APTIKA tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)	Sekretariat Ditjen APTIKA
	IKU.3.5 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen APTIKA yang Dilakukan Secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024	Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen APTIKA yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	10% dari total Rencana Pengadaan melalui Penyedia	Sekretariat Ditjen APTIKA

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN IKP TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	IKU.1.1 Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Merupakan survei persepsi kepada masyarakat terkait dengan aksesibilitas informasi kebijakan prioritas pemerintah yang telah disebar.	Dihitung dari responden usia 17-55 tahun (pria/wanita) di kota-kota besar yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur	81%	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. IK POLHUKAM • Dit. IK PMK • Dit. IK PM
	IKU.1.2 Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Konten Informasi Tentang Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Merupakan survei persepsi kepada masyarakat terkait dengan kualitas konten informasi kebijakan prioritas pemerintah yang telah disebar.	Dihitung dari responden usia 17-55 tahun (pria/wanita) di kota-kota besar yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur	81%	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. IK POLHUKAM • Dit. IK PMK • Dit. IK PM
	IKU.1.3 Persentase (%) Tingkat Kepuasan Masyarakat di Wilayah 3T Terhadap Informasi Publik	Merupakan survei persepsi kepada masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik.	Survei terhadap masyarakat di daerah tertinggal yang memiliki posisi geografis terdepan dan terluar wilayah NKRI yang mewakili Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Indikator tertinggal merujuk Perpres No, 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.	84%	Dit. PM

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.1.4 Persentase (%) Berita Hoax yang Berhasil Dikonter	Sebanyak 87% berita hoax sektoral yang terdata dalam <i>trustpositif.kominfo.go.id</i> berhasil dikonter setiap bulannya	Persentase merupakan pembagian dari jumlah berita hoaks yang telah diklarifikasi terhadap jumlah berita hoaks yang dimuat dalam situs <i>trustpositif.kominfo.go.id</i> (situs yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika)	87% (dari jumlah berita yang tersaring)	<ul style="list-style-type: none"> • Dit. IK POLHUKAM • Dit. IK PM • Dit. IK PMK
	IKU.1.5 Persentase (%) K/L/D yang sudah Melaksanakan Urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Sebanyak 99 dari total 120 K/L/D telah melaksanakan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi publik sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan kategori informatif	$\frac{\text{Hasil K/L/D yang berkategori informatif}}{120 \text{ (total K/L/D)}} \times 100\%$	82%	Dit. TKKKP
	IKU.1.6 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah melalui PSO Bidang Pers	Hasil survei persepsi masyarakat terhadap produk PSO Antara	Hasil pelaksanaan survei persepsi terhadap produk PSO Antara	80%	Sekretariat Ditjen IKP
SP.2 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik	IKU.2.1 Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan	Total Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di K/L/D yang Ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Komunikasi Publik Nasional 2. Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas 3. Naskah Akademik Revisi UU No. 14/2008 	11 Naskah	Dit. TKKKP

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Kajian Layanan Informasi Instant Messaging yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah 5. Kajian Pengembangan Layanan Informasi Publik Secara Daring Berbasis Aplikasi Umum Berbagi Pakai 6. Akreditasi Lembaga Profesi Jabatan Fungsional Pranata Humas 7. Kajian Evaluasi Jabatan Fungsional Pranata Humas 8. Kajian Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Keterampilan 9. Kajian Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas 10. Kajian Pola dan Proses Bisnis Kemitraan Digital Antara Pemerintah dan Masyarakat 11. Kajian Konten Berbasis Kecerdasan Buatan 		
<p>SP.3</p> <p>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</p>	<p>IKU.3.1</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen IKP</p>	<p>Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri oleh Inspektorat Jenderal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen IKP Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik Ditjen IKP</p>	<p>Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan / <i>on-going</i></p>	<p>85,75</p> <p>(Penilaian Itjen)</p>	<p>Sekretariat Ditjen IKP</p>

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.3.2 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen IKP Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran Ditjen IKP yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	92,15	Sekretariat Ditjen IKP
	IKU.3.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Ditjen IKP Tahun 2024	Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)	<p>Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA E1 di ukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:</p>	100	Sekretariat Ditjen IKP

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN				TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA	
			No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian				
			(1)	(2)	Bobot	Bobot Pengu-rang	Nilai Pengu-rang		
					(3)	(4)	(4) x (3)		
			1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50				
				1) Tidak ada temuan		0%	0		
				2) Jumlah temuan 1		-20%	-10		
				3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15		
				4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25		
			2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50				
				1) Nilai 100		0%	0		
				2) Nilai 90 - 99		-20%	-10		
				3) Nilai 80 - 89		-30%	-15		
				4) Nilai dibawah 80		-50%	-25		

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.3.4 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP Tahun 2024	Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP tahun 2024 Diukur dari Pembelian atau Pencatatan Melalui Aplikasi SPSE	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	86,53% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)	Sekretariat Ditjen IKP
	IKU.3.5 Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024	Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Ditjen IKP yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	40% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)	Sekretariat Ditjen IKP

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPSDM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.1 Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK	IKU.1.1 Persentase (%) Peserta Pelatihan Kepemimpinan Digital yang Kompeten	Peserta yang mengikuti pelatihan Kepemimpinan Digital (<i>Digital Leadership Academy/DLA</i>) yang mendapatkan sertifikat. Untuk tahun 2024 ditargetkan peserta pelatihan sebanyak 100 orang	$\frac{\sum \text{peserta pelatihan kepemimpinan digital yang mendapatkan sertifikat}}{\sum \text{peserta pelatihan kepemimpinan digital}} \times 100\%$ <p>Keterangan Metode Pengukuran: Peserta DLA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 20 persen dari total jam pelatihan dan menyusun <i>output</i> pembelajaran berupa penugasan, menyerahkan rancangan aksi, dan lulus ujian seminar <i>policy brief</i> dan atau rencana aksi</p>	85% (85 peserta dari total target 100 peserta)	Pusdiklat
	IKU.1.2 Persentase (%) Peserta Pelatihan <i>Digital Skill</i> yang Kompeten	Peserta yang mengikuti pelatihan Digital Skill yang mendapatkan sertifikat. Untuk tahun 2024 ditargetkan peserta pelatihan sebanyak 49.900 orang.	$\frac{\sum \text{peserta pelatihan digital skill yang mendapatkan sertifikat}}{\sum \text{peserta pelatihan digital skill atau } \sum \text{peserta pelatihan yang berhak mengikuti sertifikasi kompetensi (khusus VGA)}} \times 100\%$ <p>Keterangan Metode Pengukuran: 1. Fresh Graduate Academy (FGA) Peserta FGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan. 2. Vocational School Graduate Academy (VSGA) Peserta VSGA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang lulus sertifikasi kompetensi.</p>	83,75% (41.791 peserta dari total target 49.900 Peserta)	<ul style="list-style-type: none"> • Puslitbang APTIKA dan IKP • Puslitbang SDPPPI • Pusbang Proserti • Pusdiklat • UPT di lingkup BPSDM • STMM Yogyakarta

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			<p>3. Government Transformation Academy (GTA) Peserta GTA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi ketentuan ketidakhadiran tidak lebih dari 10% dari total jam pelatihan dan memenuhi nilai akhir minimal 65 terdiri atas <i>pre test</i>, penugasan, dan <i>post test</i>.</p> <p>4. Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Peserta DEA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti pelatihan, mencapai nilai <i>post test</i> minimal 60 dan khusus untuk kurikulum yang mendapatkan pendampingan harus mengumpulkan salah satu tugas pendampingan.</p> <p>5. Thematic Academy (TA) Peserta TA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 yang terdiri atas : penilaian absensi, <i>post test/final exam</i> dan atau kuis/tugas.</p> <p>6. Professional Academy (Pro A) Peserta ProA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi kriteria kelulusan oleh mitra pelatihan ProA.</p> <p>7. Talent Scouting Academy (TSA) Peserta TSA yang berhak mendapatkan sertifikat adalah peserta yang memenuhi nilai akhir minimal 60 sesuai dengan kriteria masing-masing mitra pelatihan.</p>		

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBP	IKU.2.1 Persentase (%) Realisasi Target PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	Realisasi target penerimaan PNBP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika TA 2024 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai PNBP, dengan target PNBP TA 2024 sebesar Rp20.071.604.000	$\frac{\Sigma \text{total realisasi PNBP}}{\Sigma \text{target PNBP}} \times 100\%$	100% (Rp20.071.604.000)	<ul style="list-style-type: none"> • STMM Yogyakarta • Pusdiklat • BPPTIK
SP.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPSDM Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik BPSDM	Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri oleh Inspektorat Jenderal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPSDM Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik BPSDM	Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/ <i>on-going</i>	91 (Penilaian Itjen)	Sekretariat BLSDM
	IKU.3.2 Nilai Kinerja Anggaran BPSDM Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran BPSDM yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	93,69	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat BLSDM • STMM Yogyakarta • UPT di lingkup BPSDM

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	<p>IKU.3.3</p> <p>Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BPSDM Tahun 2024</p>	<p>Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)</p>	<p>Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA E1 di ukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:</p>	<p>90</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat BLSDM • STMM Yogyakarta • UPT di lingkup BPSDM

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN					TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
			No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian				
					Bobot	Bobot Pengu-rang	Nilai Pengu-rang		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)		
			1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50				
				1) Tidak ada temuan		0%	0		
				2) Jumlah temuan 1		-20%	-10		
				3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15		
				4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25		
			2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50				
				1) Nilai 100		0%	0		
				2) Nilai 90 - 99		-20%	-10		
				3) Nilai 80 - 89		-30%	-15		
				4) Nilai dibawah 80		-50%	-25		

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	<p>IKU.3.4</p> <p>Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Kominfo Tahun 2024</p>	<p>Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam pengadaan Barang dan Jasa BPSDM tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE</p>	<p>Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.</p>	<p>Min. 40% (dari total Nilai Anggaran Belanja Barang/Jasa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat BLSDM • Puslitbang SDPPPI • Puslitbang APTIKA dan IKP • Pusbang Proserti • Pusdiklat • UPT di lingkup BPSDM • STMM Yogyakarta
	<p>IKU.3.5</p> <p>Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM Kominfo yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024</p>	<p>Realisasi Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BPSDM yang dilakukan secara Elektronik (<i>E-Purchasing</i>) Tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui Aplikasi SPSE.</p>	<p>Dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui Aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.</p>	<p>Min. 30% (dari total Rencana Pengadaan Melalui Penyedia)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat BLSDM • Puslitbang SDPPPI • Puslitbang APTIKA dan IKP • Pusbang Proserti • Pusdiklat • UPT di lingkup BPSDM • STMM Yogyakarta

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA BLU BAKTI TAHUN 2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.1 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Non Komersial	IKU.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah 3T yang Mendapatkan Akses Seluler 4G (Kumulatif)	Jumlah lokasi layanan BTS USO dan 4G yang beroperasi di wilayah 3T: 1. OM BTS 4G/Lasmile Non Papua sebanyak 2.884 lokasi 2. OM BTS 4G/Lasmile Papua sebanyak 2.141 lokasi	Jumlah lokasi BTS USO dan BTS 4G di wilayah 3T yang telah beroperasi	5.025 Desa/Kelurahan	Dit. Infrastruktur
	IKU.1.2 Jumlah Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) di Terrestrial melalui <i>Ground Segment</i> /IP Hub (kumulatif)	Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) yang terhubung melalui stasiun bumi dan perangkat IP HUB	Jumlah Kapasitas Satelit Multifungsi (SATRIA 1) yang telah berkontrak	10 Gbps	Dit. Infrastruktur
SP.2 Tercapainya Target PNBK Kementerian Kominfo	IKU.2.1 Persentase (%) Realisasi Target PNBK Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	Realisasi target penerimaan PNBK BAKTI TA 2024 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai PNBK, dengan target PNBK TA 2024 sebesar Rp3.582.000.000.000	Akumulasi Persentase Realisasi PNBK berdasarkan nilai penerimaan yang diinput dan disahkan di aplikasi SAKTI pada bulan bersangkutan.	100% (Rp3.582.000.000.000)	Dit. Keuangan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
SP.3 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	IKU.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi BAKTI Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik BAKTI	Implementasi Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri oleh Inspektorat Jenderal atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAKTI Tahun 2024 berdasarkan Realisasi Rencana Aksi RB Tematik BAKTI	Evaluasi internal oleh Inspektorat Jenderal dengan menghitung ketercapaian atas rencana aksi berdasarkan evaluasi perencanaan/ <i>on-going</i>	60,88 (Penilaian Itjen)	Dit. Sumber Daya Administrasi
	IKU.3.2 Nilai Kinerja Anggaran BAKTI Tahun 2024	Penilaian atas kinerja anggaran BLU BAKTI yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan gabungan nilai SMART (50%) dan IKPA (50%).	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = Nilai SMART (50%) + Nilai IKPA (50%).	88	Dit. Keuangan
	IKU.3.3 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) BAKTI Tahun 2024	Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Eselon I selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E1)	Nilai kualitas pelaporan keuangan di level Eselon I selaku UAPPA E1 di ukur berdasarkan 2 komponen penilaian sebagai berikut: 1. Komponen penilaian “Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK” yang diperoleh dari uraian yang dicantumkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2. Komponen penilaian “Rata-rata nilai kualitas pelaporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran” yang diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata nilai laporan keuangan di level	80	Dit. Keuangan

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA																																																															
			<p>Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)</p> <p>Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:</p> <p>Indikator penilaian untuk Laporan Keuangan Kementerian dihitung dari skala 100 yang dikurangkan dengan faktor pengurang sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1283 670 1731 1388"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I</th> <th colspan="3">Metode Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Bobot</th> <th>Bobot Pengurang</th> <th>Nilai Pengurang</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(4) x (3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Tidak ada temuan</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Jumlah temuan 1</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Jumlah temuan 2 s.d. 3</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Jumlah temuan > 3</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA</td> <td>50</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Nilai 100</td> <td></td> <td>0%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Nilai 90 - 99</td> <td></td> <td>-20%</td> <td>-10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Nilai 80 - 89</td> <td></td> <td>-30%</td> <td>-15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Nilai dibawah 80</td> <td></td> <td>-50%</td> <td>-25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian			Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang	(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)	1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50				1) Tidak ada temuan		0%	0		2) Jumlah temuan 1		-20%	-10		3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15		4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25	2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50				1) Nilai 100		0%	0		2) Nilai 90 - 99		-20%	-10		3) Nilai 80 - 89		-30%	-15		4) Nilai dibawah 80		-50%	-25		
No	Komponen Penilaian Laporan Keuangan Level Eselon I	Metode Penilaian																																																																		
		Bobot	Bobot Pengurang	Nilai Pengurang																																																																
(1)	(2)	(3)	(4)	(4) x (3)																																																																
1	Jumlah temuan yang mempengaruhi opini BPK	50																																																																		
	1) Tidak ada temuan		0%	0																																																																
	2) Jumlah temuan 1		-20%	-10																																																																
	3) Jumlah temuan 2 s.d. 3		-30%	-15																																																																
	4) Jumlah temuan > 3		-50%	-25																																																																
2	Rata-rata Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA	50																																																																		
	1) Nilai 100		0%	0																																																																
	2) Nilai 90 - 99		-20%	-10																																																																
	3) Nilai 80 - 89		-30%	-15																																																																
	4) Nilai dibawah 80		-50%	-25																																																																

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET 2024	PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR KINERJA
	IKU.3.4 Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa BAKTI Tahun 2024	Realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam pengadaan Barang dan Jasa BLU BAKTI tahun 2024 diukur dari pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.	Dihitung berdasarkan persentase belanja PDN dan produk UMKM terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa.	40%	Dit. Sumber Daya Administrasi

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI ARIE SETIADI